

INTISARI

Konsolidasi Tanah merupakan bentuk pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah yang dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum. Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung merupakan salah satu daerah pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Lokasi ini merupakan tanah relokasi untuk pengungsian korban tanah longsor. Bidang-bidang di area ini banyak yang belum bersertifikat dan penataan bidangnya belum teratur. Program Konsolidasi Tanah tahun 2014 telah membantu masyarakat dalam memperoleh sertifikat bidang tanah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah dan hasil pelaksanaan Konsolidasi Tanah berdasarkan aspek fisik (jumlah, luas dan bentuk bidang tanah), aspek institusi (Peraturan atau Undang-Undang) dan aspek ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam proses evaluasi penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu membandingkan antara teori maupun peraturan-peraturan dengan pelaksanaan di lokasi penelitian. Analisis aspek fisik dilakukan dengan membandingkan data spasial sebelum dan sesudah Konsolidasi Tanah yang berupa peta hasil digitasi di *software ArcGIS* dengan data laporan Konsolidasi Tanah dari BPN dan hasil cek lapangan. Analisis aspek institusi sama dengan tahap evaluasi proses. Analisis aspek ekonomi dilakukan melalui wawancara langsung dengan warga di lokasi penelitian.

Konsolidasi Tanah di Desa Bejen sudah sesuai dengan prinsip dasar Konsolidasi Tanah yaitu penataan bidang tanah menjadi teratur dan menghadap ke jalan. Namun, proses pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bejen berbeda dengan pelaksanaan Konsolidasi Tanah pada umumnya yaitu dengan adanya pembiayaan dari dana APBN. Peserta Konsolidasi Tanah merupakan pemilik tanah yang belum mempunyai sertifikat. Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan (STUP) dialokasikan untuk pelebaran jalan dan jalan baru, sedangkan untuk fasilitas umumnya berasal dari wakaf peserta Konsolidasi Tanah. Analisis pada aspek ekonomi dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Sugihwaras diketahui bahwa ada kenaikan harga tanah mencapai dua kali lipat.

Kata kunci: Konsolidasi Tanah, evaluasi proses.

ABSTRACT

Land Consolidation is a kind of land authority ruling and structuring which is done in order to improve the quality of environment and also to provide land in order to build infrastructure and public facility. Bejen Village, Bejen Sub-district, Temanggung Regency, is one of Land Consolidation realization region. This region is relocation land for refugee of land slide victims. The fields in this area have not been certified mostly and their ordering has not been well-organized yet. Land Consolidation Program in 2014 has helped the society to obtain certificates of land fields.

This research was conducted to determine the process of Land Consolidation realization and the results of Land Consolidation realization based on physical aspects (amount, width, and shape of the land fields), institutional aspects (regulation or act), and economic aspects. The analytical method used in the evaluation process of this research is descriptive method, which is comparing between theories and regulations with the realization in the research site. The analysis of physical aspects was done by comparing spatial data before and after the Land Consolidation in the form of digitization results map in ArcGIS software with the report data of Land Consolidation from BPN and the results of field checks. The analysis of institutional aspects is the same as process evaluation stage. The analysis of the economic aspects was conducted through direct interviews with the residents in the research site.

Land Consolidation in Bejen Village has been suitable with the basic principles of Land Consolidation, which is the ordering of the land fields becoming well-organized and facing the street. But, the process of Land Consolidation realization in Bejen Village is different from Land Consolidation realization in general, due to the existence of grant from APBN funds. The participants of Land Consolidation are the owners of the lands who have not yet had the certificates. The land donations for development (STUP) was allocated for road widening and new road, while for public facilities came from the endowments of Land Consolidation participants. The analysis on the economic aspects based on the interview results with the Village Chief of Sugihwaras could reveal that there was an increase in land prices doubled.

Keywords: *Land Consolidation, process evaluation.*